



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### Tinjauan Pustaka

##### 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

###### a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Wikipedia adalah konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Menurut Yusuf Wibisono (2007) definisi CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Boone dan Kurtz (dikutip oleh Harmoni dan Ade, 2008), pengertian tanggungjawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Sedangkan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) pengertian CSR adalah keterpanggilan dunia bisnis untuk bertindak etis dan berkontribusi dalam dunia pembangunan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas setempat dan masyarakat luas. Tamam Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam

A. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



domensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan sebagai konsep bagi para pebisnis untuk tidak hanya memperhatikan perusahaan dalam mencari keuntungan saja, pertanggung jawaban perusahaan saat ini bukan hanya kepada *shareholder* saja tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### b. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bradshaw dalam Harahap (2008: 400) mengemukakan tiga bentuk tanggung jawab social perusahaan sebagai berikut:

(1). *Corporate philanthropy*

Tanggung jawab perusahaan berada sebatas kedermawanan atau kerelaan, belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

(2). *Corporate responsibility*

Kegiatan pertanggungjawaban sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau ketersediaan perusahaan.

(3). *Corporate policy*

Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. **Komponen Utama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Menurut Wibisono (2007: 134), CSR terdiri dari beberapa komponen utama yaitu perlindungan lingkungan, perlindungan dan jaminan karyawan, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, kepemimpinan dan pemegang saham, penanganan produk dan pelanggan, pemasok, serta komunikasi dan laporan.

#### (1). **Perlindungan Lingkungan**

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Lingkungan tempat usaha harus dijaga keadaannya jangan sampai terjadi kerusakan. Sehingga, eksistensi perusahaan juga dapat terjamin. Contohnya: pengelolaan limbah yang dihasilkan sebagai residu dari proses produksi harus terlebih dahulu di netralisir sebelum dibuang.

#### (2). **Perlindungan dan Jaminan Karyawan**

Tanpa karyawan perusahaan sudah dipastikan tidak mampu menjalankan kegiatannya. Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya. Pada saat karyawan merasa bahwa dirinya bersinergi dengan perusahaan hal ini akan berdampak positif terhadap perusahaan. Perusahaan memberikan imbalan yang sesuai maka karyawan akan memberikan kontribusi yang positif, dan kerja keras demi perusahaan. Contohnya: pelatihan karyawan.

#### (3). **Interaksi dan Keterlibatan Perusahaan dengan Masyarakat**

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitar harus menjaga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harmonisasi agar bersinergi. Pada saat masyarakat lokal memboikot keberadaan perusahaan ini merupakan masalah yang serius bagi keberlanjutan usaha. Contohnya: mempekerjakan penduduk lokal.

(4). Kepemimpinan dan Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini disebabkan mereka telah berinvestasi dan mengharapkan hasil investasi yang maksimal dari saham yang mereka miliki. Contohnya: semua informasi tentang program yang dilakukan perusahaan dapat melibatkan pemegang saham dalam hal-hal yang bersifat *non financial*.

(5). Penanganan Pelanggan dan Produk

Pelanggan adalah raja merupakan pepatah yang benar adanya. Pada saat pelanggan merasa puas dengan produk yang dihasilkan maka mereka akan melakukan pemesanan/pembelian kembali. Hal ini dapat membuat bisnis terus berjalan dan mendapatkan keuntungan. Pada saat hal-hal yang mendetail misalnya mengabaikan kepuasan pelanggan, mereka akan melakukan *brandswitching*. Hal ini akan membuat perusahaan mengalami penurunan keuntungan. Contohnya: menanggapi keluhan pelanggan dengan menyediakan *customes service* yang mudah diakses.

(6). Pemasok

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan, karena pemasok mengetahui keinginan perusahaan dan dapat memenuhinya. Contohnya: komunikasi dengan pemasok.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (7). Komunikasi dan Laporan

Keterbukaan terhadap komunikasi dan laporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi *stakeholder*. Contohnya: mencantumkan pengungkapan kontribusi sosial ke dalam laporan tahunan.

Sedangkan menurut Bank Dunia, tanggung jawab social perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama yaitu, perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan terhadap masyarakat, standar usaha, pasar pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan serta bantuan bencana kemanusiaan.

#### d. Keterlibatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Harahap (2008: 397), ada tiga pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan social, yaitu:

##### (1). Model Klasik

Menurut model ini, perusahaan tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaannya dan tidak perlu memikirkan usaha untuk memperbaiki penyakit sosial. Itu bukan urusan bisnis tetapi urusan pemerintah.

##### (2). Model Manajemen

Menurut model ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Manajer sebagai orang yang dipercayai oleh pemilik modal menjalankan perusahaan untuk kepentingan bukan saja pemilik modal, tetapi juga mereka yang terlibat langsung dengan hidup matinya perusahaan. Dengan demikian, manajer



sebagai tim yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungannya dengan pihak lain yang juga punya andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran untuk pemilik modal.

### (3). Model Lingkungan Sosial

Menurut model ini, ditekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori model klasik. Perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyakit sosial yang berada di lingkungannya. Dalam model ini, perusahaan harus memperluas tujuannya yaitu yang menyangkut kesejahteraan sosial secara umum. Dengan demikian, dalam memilih proyek yang akan dibangun, di samping memperhatikan presentasi laba, juga harus memperhatikan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diderita oleh masyarakat.

### e. Perkembangan CSR

Perkembangan CSR secara konseptual menurut Rika dan Islahuddin (2008) mulai dibahas sejak tahun 1980-an yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- (1). Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangya paham komunis dan bergantinya ke imperium kapitalisme secara global.
- (2). Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara berkembang sehingga dituntut memperhatikan kesadaran sosial, lingkungan dan hak asasi manusia.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3). Globalisasi dan berkurangnya peran pemerintah telah menyebabkan munculnya lembaga sosial masyarakat yang lebih memperhatikan isu kemiskinan sampai kekuatiran punahnya spesies tumbuhan dan hewan akibat ekosistem yang semakin labil.
- (4). Kesadaran perusahaan akan pentingnya citra perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan.

Selain itu menurut Deegan (dalam Chariri dan Ghozali, 2007) alasan yang mendorong praktik tanggungjawab social perusahaan dan lingkungan secara lain:

- (1). Mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang
- (2). Pertimbangan rasionalitas ekonomi
- (3). Mematuhi pelaporan dan proses akuntabilitas
- (4). Mematuhi persyaratan pinjaman
- (5). Mematuhi harapan masyarakat
- (6). Konsekuensi ancaman atas legitimasi perusahaan
- (7). Mengelola sekelompok *stakeholder* tertentu
- (8). Menarik dana investasi
- (9). Mematuhi persyaratan industri
- (10). Memenangkan penghargaan pelaporan

#### f. Teori yang Mendasari Praktik CSR

Gray *et. al.* (1995) dalam Rita Yuliana *et. al.* (2008: 248) mengemukakan beberapa teori yang melatarbelakangi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial, yaitu:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### (1) *Decision Usefulness Studies*

Teori ini memasukkan para pengguna laporan akuntansi yang lain selain para investor ke dalam kriteria dasar pengguna laporan akuntansi sehingga suatu pelaporan akuntansi dapat berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh semua unsur pengguna laporan tersebut. Beberapa peneliti melakukan studi dan menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh pengguna. Studi tersebut meminta para analis, *banker*, dan pihak lain yang terlibat untuk memberikan peringkat terhadap informasi akuntansi, Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi.

### (2) *Economic Theory Studies*

Studi ini berdasarka *economic agency theory*. Teori tersebut membedakan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dan menyiratkan bahwa pengelola perusahaan harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala sumber daya yang dimiliki dan dikelolanya kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, frase pemilik perusahaan mengalami perkembangan lebih lanjut, tidak hanya pemilik modal (*shareholder*), tetapi juga meluas ke unsure *stakeholders* lainnya, yaitu masyarakat luas termasuk pemerintah dan lingkungan alam. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan juga dituntut untuk membuat pelaporan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholdersI tersebut*.



### (3) *Social and Political Studies*

Sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, sosial, dan kerangka institusional tempat ekonomi berada. Studi sosial dan politik mencakup dua teori utama, yaitu pertama, *Stakeholder Theory* yang mengasumsi bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *Stakeholders*. Fokus utama dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan para *stakeholders*-nya. Kedua, *Legitimacy Theory* yang mengatakan bahwa perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang telah diterapkan masyarakat. Usaha perusaah antara lain mewujudkan melalui pengungkapan sosial. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar aktivitas dan keberadaan perusahaan terlegitimasi di mata masyarakat.

Teori lain yang mendukung praktik pengungkapan sosial adalah teori kontrak sosial, yang juga dijelaskan dalam Rita Yuliana et. al. (2008: 270). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas. Perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya untuk melaksanakan tugas tertentu dalam batasan-batasan keadilan. Dengan demikian, hubungan yang terjadi adalah hubungan timbal balik atau hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. *Social cost* yang dibayar oleh masyarakat harus dikompensasi dengan *social benefit* yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. *Global Reporting Initiative (GRI)*

### a. Definisi GRI

Menurut <https://www.globalreporting.org>, *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja ke arah ekonomi global yang berkelanjutan dengan memberikan panduan pelaporan berkelanjutan.

GRI telah merintis dan mengembangkan kerangka komprehensif pelaporan keberlanjutan yang banyak digunakan di seluruh dunia. Kerangka ini memungkinkan semua organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, kinerja sosial dan pemerintahan (empat bidang utama berkelanjutan)

Kerangka pelaporan yang meliputi pedoman pelaporan, pedoman sektor dan sumber daya lain, memungkinkan adanya transparansi organisasi yang lebih besar tentang ekonomi, kinerja lingkungan, sosial dan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas ini membangun kepercayaan pemangku kepentingan dalam organisasi, dan dapat menyebabkan banyak manfaat lainnya. Ribuan organisasi, dari semua ukuran dan sektor, menggunakan kerangka GRI untuk memahami dan mengkomunikasikan kinerja berkelanjutan mereka.

Peneliti menggunakan GRI sebagai indikator dari pengukuran luas pengungkapan *corporate social responsibility* dari perusahaan sampel. Hal tersebut dikarenakan GRI merupakan panduan yang bersifat, selain itu, acara penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Awards 2011* juga menggunakan GRI *Guidelines* sebagai acuannya.

### b. Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam mengambil keputusan (Suwardjono, 2010:583).

*Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability Report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada bisnis utama (*core business*) dan sektor industrinya.

Salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan adalah GRI G3 *Guidelines*. GRI dan pedoman G3 telah membentuk kemitraan kolaboratif dengan Program Lingkungan PBB, Global Compact PBB, dan Prakarsa Piagam Bumi. Sejumlah dokumen dan kesepakatan dari organisasi, seperti OECD dan ILO, juga telah direferensikan untuk tujuan menciptakan Pedoman G3 (<http://id.hicow.com>). Berikut penjelasan mengenai indikator *Global Reporting Initiative, G3 Guidellines* (2006:26):

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.1**

**Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI**

<b>Indikator Kinerja : Ekonomi</b>	
<b>Kategori 1 : Ekonomi</b>	
<b>EC1 (Core)</b>	Nilai ekonomi yang dihasilkan: pendapatan, biaya usaha, kompensasi karyawan, donasi dan investasi pada masyarakat, saldo laba dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
<b>EC2 (Core)</b>	Implikasi perubahan iklim terhadap keuangan, risiko dan kesempatan dalam berusaha.
<b>EC3 (Core)</b>	Cakupan organisasi dalam menetapkan manfaat dari rencana obligasi.
<b>EC4 (Core)</b>	Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah.
<b>Aspek: Keberadaan Pasar</b>	
<b>EC5 (Add)</b>	Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan upah minimum regional berdasarkan wilayah kerja.
<b>EC6 (Core)</b>	Kebijakan, praktik dan besarnya transaksi pembelian dengan <i>supplier</i> local sesuai kegiatan perusahaan.
<b>EC7 (Core)</b>	Prosedur perekrutan karyawan lokal dan proporsi manajemen senior yang diangkat dari komunitas lokal tempat perusahaan beroperasi.
<b>Aspek: Dampak Ekonomi Langsung</b>	
<b>EC8 (Core)</b>	Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa untuk kepentingan publik.
<b>EC9 (Core)</b>	Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak langsung, termasuk besarnya dampak yang terjadi
<b>Indikator Kinerja: Lingkungan</b>	
<b>Kategori 2: Lingkungan</b>	
<b>Aspek: Bahan</b>	
<b>EN1 (Core)</b>	Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
<b>EN2 (Core)</b>	Presentase bahan baku yang dapat didaur ulang.
<b>Aspek: Energi</b>	
<b>EN3 (Core)</b>	Pemakaian energi langsung berdasarkan sumber energi.
<b>EN4 (Core)</b>	Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utamanya.
<b>EN5 (Add)</b>	Penghematan energi karena konservasi dan pengembangan efisiensi.
<b>EN6 (Add)</b>	Usaha untuk menyediakan energi yang efisien atau dapat diperbaharui dalam proses produksi/jasa dan pengurangan pemakaian energi karena

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

	penghematan yang dilakukan.
<b>EN7 (Add)</b>	Usaha untuk mengurangi pemakaian energi tidak langsung dan tercapainya target pengurangan.
<b>Aspek: Air</b>	
<b>EN8 (Core)</b>	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
<b>EN9 (Add)</b>	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh penarikan air.
<b>EN10 (Add)</b>	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan lagi.
<b>Aspek: Keanekaragaman Hayati</b>	
<b>EN11 (Core)</b>	Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewa atau dikelola berhadapan langsung dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.
<b>EN12 (Core)</b>	Deskripsi tentang dampak aktivitas, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati di area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.
<b>EN13 (Add)</b>	Habitat yang dilindungi dan dijaga.
<b>EN14 (Add)</b>	Strategi, aksi terkini dan rencana kedepan untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan pada keanekaragaman hayati.
<b>EN15 (Add)</b>	Jumlah spesies IUCN <i>Red list</i> dan daftar spesies konservasi asional dengan habitat di daerah yang terpengaruh oleh operasi, dengan tingkat resiko kepunahan.
<b>Aspek: Emisi, Saluran Pembuangan, dan Limbah</b>	
<b>EN16 (Core)</b>	Total emisi gas rumah kaca langsung atau tidak langsung berdasarkan bobot/timbangannya.
<b>EN17 (Core)</b>	Emisi gas rumah kaca lainnya yang relevan berdasarkan bobot/timbangannya.
<b>EN18 (Add)</b>	Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan tingkat pengurangan yang dihasilkan
<b>EN19 (Core)</b>	Emisi kandungan ozone dan penurunan kandungan berdasarkan bobot/timbangan.
<b>EN20 (Core)</b>	NO, SO dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan jenis dan bobotnya.
<b>EN21 (Core)</b>	Pembebasan total air berdasarkan kualitas dan tujuan.
<b>EN22 (Core)</b>	Total bobot limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
<b>EN23 (Core)</b>	Total jumlah dan volume buangan yang signifikan.
<b>EN24</b>	Berat sampah berbahaya yang dipindahkan, diimpor, diekspor atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(Add)	diperlakukan sesuai <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , dan presentase sampah pindahan yang dikirim internasional dengan kapal.
EN25 (Add)	Identitas, ukuran, status dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati dari air dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh pembuangan sampah perusahaan.
<b>Aspek: Produk dan Jasa</b>	
EN26 (Core)	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan jasa, dan tingkat dampak mitigasi.
EN27 (Core)	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang diklaim berdasarkan kategori
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
EN28 (Core)	Besarnya denda keuangan dan sanksi lain karena tidak mematuhi peraturan lingkungan.
<b>Aspek: Transportasi</b>	
EN29 (Add)	Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang digunakan perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan.
<b>Aspek: Secara Keseluruhan</b>	
EN30 (Add)	Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi/memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya.
<b>Indikator Kinerja: Sosial</b>	
<b>Kategori 3: Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak</b>	
<b>Aspek: Ketenagakerjaan</b>	
LA1 (Core)	Total tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja dan daerah asal.
LA2 (Core)	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah asal.
LA3 (Add)	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap ( <i>full-time</i> ) yang tidak diberikan kepada karyawan paruh waktu ( <i>part-time</i> ) atau sementara berdasarkan kegiatan utama.
<b>Aspek: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>	
LA4 (Core)	Persentase karyawan yang dilindungi oleh perjanjian kerja.
LA5 (Core)	Periode pemberitahuan minimum berkaitan dengan perubahan kegiatan (operasi), termasuk apakah periode tersebut dimasukkan dalam perjanjian bersama.
<b>Aspek: Kesehatan dan Keamanan Kerja</b>	
LA6 (Add)	Persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi membantu dan memberi saran dalam menentukan program keselamatan dan kesehatan kerja.
LA7 (Core)	Statistik kecelakaan kerja, penyakit karena pekerjaan, ketidakhadiran dan jumlah fasilitas yang berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan wilayah.
LA8 (Core)	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan program pengendalian risiko pekerjaan untuk membantu tenaga kerja, keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

	mereka atau anggota masyarakat berkaitan dengan penyakit (wabah) tertentu.
<b>LA9 (Add)</b>	Topik kesehatan dan keselamatan kerja yang dimuat dalam perjanjian resmi (kontrak kerja) dengan serikat pekerja.
<b>Aspek: Pelatihan dan Pendidikan</b>	
<b>LA10 (Core)</b>	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis/kategori karyawan.
<b>LA11 (Add)</b>	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir karir (pensiun).
<b>LA12 (Add)</b>	Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan perkembangan karir.
<b>Aspek: Keragaman dan Kesamaan Peluang</b>	
<b>LA13 (Core)</b>	Komposisi pengelola karyawan ( <i>governance</i> ) dan rincian karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, anggota kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lainnya.
<b>LA14 (Core)</b>	Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori karyawan.
<b>Kategori 4: Hak Asasi Manusia</b>	
<b>Aspek: Praktik Investasi dan Perekrutan</b>	
<b>HR1 (Core)</b>	Persentase dan total perjanjian investasi yang dorancang dengan mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
<b>HR2 (Core)</b>	Persentase <i>supplier</i> dan kontraktor penting yang peduli dan selalu mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
<b>HR3 (Add)</b>	Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
<b>Aspek: Non-diskriminasi</b>	
<b>HR4 (Core)</b>	Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
<b>Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berdiskusi</b>	
<b>HR5 (Core)</b>	Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk kebebasan berserikat dan berdiskusi bersama serta dukungan perusahaan terhadap hal tersebut.
<b>Aspek: Tenaga Kerja Anak</b>	
<b>HR6 (Core)</b>	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
<b>Aspek: Tenaga Kerja Wajib dan Paksa</b>	
<b>HR7 (Core)</b>	Kegiatan yang dapat menimbulkan resiko munculnya paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan munculnya kejadian tersebut.
<b>Aspek: Praktik Keamanan</b>	
<b>HR8</b>	Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<i>(Add)</i>	kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
<b>Aspek: Hak-Hak Dasar</b>	
<b>HR9</b> <i>(Add)</i>	Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak-hak kaum pribumi (penduduk setempat) dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
<b>Kategori 5: Masyarakat</b>	
<b>Aspek: Komunitas</b>	
<b>SO1</b> <i>(Core)</i>	Jenis, lingkup, dan efektifitas program kegiatan yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan pada masyarakat.
<b>Aspek: Korupsi</b>	
<b>SO2</b> <i>(Core)</i>	Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki potensi korupsi.
<b>SO3</b> <i>(Core)</i>	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan program anti korupsi.
<b>SO4</b> <i>(Core)</i>	Tindakan yang dilakukan ketika terjadi kasus korupsi.
<b>Aspek: Kebijakan Publik</b>	
<b>SO5</b> <i>(Core)</i>	Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi perusahaan dalam pengembangan dan pengaruh kebijakan publik.
<b>SO6</b> <i>(Add)</i>	Total nilai bantuan keuangan dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi dan institusi terkait.
<b>Aspek: Perilaku Anti Persaingan</b>	
<b>SO7</b> <i>(Add)</i>	Jumlah tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, penentang monopoli industri, dan praktik monopoli beserta hasilnya.
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
<b>SO8</b> <i>(Core)</i>	Denda keuangan dan sanksi lainnya karena tidak mematuhi peraturan/regulasi yang berlaku.
<b>Kategori 6: Tanggung Jawab Produk</b>	
<b>Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan</b>	
<b>PR1</b> <i>(Core)</i>	Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan.
<b>PR2</b> <i>(Add)</i>	Jumlah ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi kesehatan dan keamanan produk yang dihasilkan.
<b>Aspek: Label pada Produk dan Jasa</b>	
<b>PR3</b> <i>(Core)</i>	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase jumlah produk dan jasa yang mematuhi pengungkapan tersebut.
<b>PR4</b> <i>(Add)</i>	Jumlah ketidakpatuhan pada regulasi tentang pengungkapan informasi produk dan pemberian label produk/jasa.
<b>PR5</b> <i>(Add)</i>	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan konsumen.
<b>Aspek: Komunikasi Pemasaran</b>	
<b>PR6</b>	Program yang berhubungan dengan aspek hukum, standar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

<b>(Core)</b>	komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi dan sponsor.
<b>PR7 (Add)</b>	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketidakpatuhan pada regulasi dan aturan lain yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi dan sponsor berdasarkan hasilnya.
<b>Aspek: Keleluasaan Pribadi Pelanggan</b>	
<b>PR8 (Add)</b>	Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya <i>privacy</i> konsumen dan hilangnya data konsumen.
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
<b>PR9 (Core)</b>	Denda keuangan karena tidak mematuhi peraturan hukum dan regulasi berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan.

Sumber : *Global Reporting Initiative (GRI Guidelines G3, 2006)*

Keterangan :

*Core* = indikator inti yang diidentifikasi dalam *GRI Guidelines* sebagai indikator yang menarik perhatian bagi mayoritas *stakeholders* dan diasumsikan material.

*Add* = indikator tambahan yang diidentifikasi dalam *GRI Guidelines* yang mewakili praktik yang muncul atau topik yang mungkin material bagi sebagian organisasi namun tidak bersifat umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimana terdapat pengkomunikasian mengenai informasi sosial perusahaan berupa dampak sosial selama perusahaan dan biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan.

**3. Nilai Perusahaan**

**a. Pengertian Nilai Perusahaan**

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Rahayu (2010) , terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1). Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- (2). Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi karena proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- (3). Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- (4). Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- (5). Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

Dalam mengelola kekayaannya manajemen dapat tergambar melalui nilai perusahaan. Baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan menggambarkan tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan sejalan dengan naiknya harga saham di pasar. Menurut Erlina (2008: 1) tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang diartikan melalui pemaksimuman harga saham dari perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rika dan Islahudin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Rika dan Islahuddin (2008) , karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer atau komisaris.

Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tapi setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap (Kompas, 25 November 2008). Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaan juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya di masa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin's Q.

Tobin's Q menawarkan penjelasan nilai dari suatu perusahaan. Tobin's Q model mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Nilai Tobin's Q yang rendah (antara 0 dan 1) mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva perusahaan lebih besar daripada nilai pasar perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Sedangkan bila nilai Tobin's Q suatu perusahaan tinggi (lebih dari 1), maka nilai perusahaan lebih besar daripada nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Teori Agensi

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerjasama.

Dalam rangka memahami *corporate governance* maim digunakan dasar perspektif hubungan keagenan, dimana hubungan keagenan ini akan menerangkan adanya perbedaan kepentingan, sehingga muncul konflik untuk mengejar kepentingan pribadinya. Jensen dan Meckling dalam Ujiyantho (2007:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) menyatakan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Karena perbedaan kepentingan ini maka masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif, dan remunerasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Maka tinggi laba, harga saham dan semakin besar dividen, maka agen dianggap berhasil atau berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya agen pun memenuhi kebutuhan *principal* agar mendapat kompensasi yang tinggi. Sehingga apabila tidak ada pengawasan yang memadai, sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seperti yang disampaikan oleh Sulistyanto (2008: 119), teori agensi yaitu pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* yang didasari pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada investor bahwa informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan buka rekayasa, sehingga mereka mendapat pengembalian dari investasi mereka.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan sebuah kontrak antara pemegang saham dengan manajer, yang melibatkan kepentingan hubungan antara mereka sehingga memungkinkan terjadi konflik antara keduanya.

## 5. Kepemilikan Manajemen

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham. Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen ( Tendi Haruman, 2008).

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitor aktivitas perusahaan.

Shliefer dan Vishny (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistik* manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

Morck, Sheilfer dan Vishny (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menemukan bahwa pada level 0-5% terdapat hubungan *non-linier* antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan, berhubungan negatif pada level 5-25%, berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level 25-50% dan berhubungan negatif pada level >50%.

## 6. Komite Audit

Kehadiran komite audit di perusahaan publik mendapara respons yang cukup positif dari berbagai pihak antara lain pemerintah, Bapepam-LK, para investor, prodesi akuntan, dan lain-lain. Menurut Effendi (2009: 34), komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan mata dan telinga dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Seiring dengan menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan *reliable* mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan.

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 (Amin, 2008: 49), menjelaskan pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan menurut Ikatan Komite Audit (Arief, 2009: 25), menjelaskan definisi dari komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.

Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang komisaris independen. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, komite audit yang beranggotakan terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin komite audit memiliki pengalaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Agar mampu bekerja efektif, komite audit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum.

Laux *and* Laux (2009: 870) menyatakan bahwa komite audit bertanggungjawab untuk mendeteksi, sedangkan Setiawan (2007: 8) menjelaskan secara spesifik tugas komite audit antara lain :

(1). Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya

(2). Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

(3). Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

(4). Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

(5). Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.

(6). Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 148) komite audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang,yaitu:

(1). Laporan Keuangan

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2). Tata Kelola Perusahaan

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

(3). Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**7. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.2**

**Ikhtisar Penelitian Rika Susanti**

Anasis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan	
Tahun Penelitian	2010
Variabel Independen	Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holding, Profitabilitas, Finance Risk, Dividen Payout Ratio, Investment Opportunity Set
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah <i>corporate governance</i> , <i>ownership structure</i> , <i>cash holding</i> , profitabilitas, <i>finance risk</i> , DPR, dan IOS berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil Penelitian	Penelitian ini meberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara <i>corporate governance</i> , profitabilitas, dan IOS terhadap nilai perusahaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Sedangkan <i>ownership structure</i> dan DPR memiliki hubungan positif dan tidak signifikan. Variabel <i>cash holding</i> dan <i>finance risk</i> memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan.
--	---

**Tabel 2.3**

**Ikhtisar Penelitian Vinola Herawati**

Peran Praktek Corporate Governance sebagai Variabel Moderating dari pengaruh Earning Manajemen terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Perbankan yang Go Public di BEI	
Tahun Penelitian	2008
Variabel Independen	Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan dan Earning Manajemen
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah earning manajemen, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada nilai perusahaan pada sector perbankan yang <i>go public</i> di BEI.
Hasil Penelitian	<i>Corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan earning manajemen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional merupakan variabel permoderasi antara earning manajemen dan nilai perusahaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.4**

**Ikhtisar Penelitian Nurlela dan Islahudin**

Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating	
Tahun Penelitian	2008
Variabel Independen	CSR, Prosentase Kepemilikan Manajemen
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya prosentase kepemilikan manajemen.
Hasil Penelitian	CSR, prosentasi kepemilikan manajerial serta interaksi antara CSR dengan presentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

**Tabel 2.5**

**Ikhtisar Penelitian Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma**

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan GCG sebagai Variabel Pemoderasi	
Tahun Penelitian	2007
Variabel Independen	Kinerja Keuangan, CSR, dan GCG
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh



	terhadap nilai perusahaan dengan adanya CSR dan GCG sebagai variabel pemoderasi.
Hasil Penelitian	<i>Return on Asset</i> terbukti berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif pada hubungan <i>return on asset</i> dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Tabel 2.6**

**Ikhtisar Penelitian Kusumadilaga**

Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating	
Tahun Penelitian	2010
Variabel Independen	CSR dan ROA
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya profitabilitas sebagai variabel moderasi.
Hasil Penelitian	Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas sebagai variabel pemoderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan diatas dalam landasan teori serta tinjauan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tentang praktik tanggungjawab social perusahaan. Hal ini dilakukan karena munculnya masalah yaitu kewajiban utama kepada pemegang saham yang selain itu juga harus memperhatikan tuntutan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh tanggungjawab social perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan adanya pengaruh kepemilikan manajerial dan komite audit. Selain itu juga memperhatikan pola yang meliputi tema dan item pada perusahaan yang tergolong dalam industri pertambangan yang melakukan tanggungjawab social pada perusahaannya.

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderat. Variabel independennya adalah tingkat tanggungjawab social pada perusahaan pertambangan. Variabel dependennya adalah nilai perusahaan.

Sedangkan variabel moderatnya terdiri dari kepemilikan manajemen dan komite audit.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Rika dan Ishlahuddin, 2008). CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban yang berupa informasi yang disampaikan dalam laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahunan perusahaan mengenai tanggung jawab perusahaan atas kegiatan operasi perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan atas dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Priyanto, 2008).

Penelitian Zuhroh dan Putu (2003) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang *go public* telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*. Artinya bahwa investor sudah memulai merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan social yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi laporan tahunan sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Kepercayaan *stakeholder* terhadap iklim usaha dan kinerja perusahaan tentunya tidak terlepas dari peran *corporate governance*. *Forum Corporate Governance in Indonesia* merumuskan *corporate governance* sebagai suatu system tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

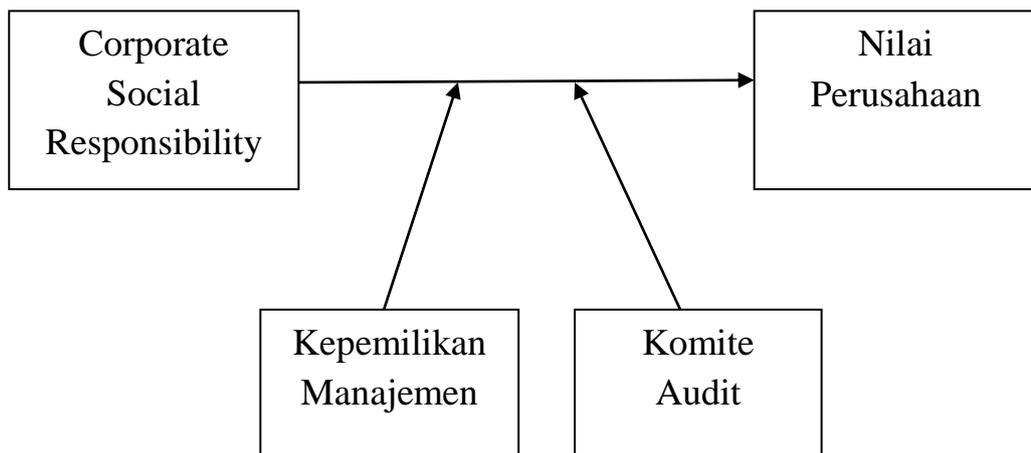


Manfaat dari penerapan *corporate governance* dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor (Rustiarini, 2010).

Apabila dilihat dari aspek kepemilikan manajemen, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh pada nilai perusahaan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007; Nurlala dan Ishlahuddin, 2008). Semakin tinggi kepemilikan *insider*, semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika lembaga institusi mampu menjadi alat pemantauan yang efektif. Penelitian mengenai dampak komite audit juga berpengaruh pada nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Hipotesis

Ⓒ Dengan demikian berdasarkan teori-teori dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub> : Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Ha<sub>2</sub> : Kepemilikan manajemen memperkuat hubungan tanggungjawab sosial perusahaan pada nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Ha<sub>3</sub> : Komite audit memperkuat hubungan tanggungjawab sosial perusahaan pada nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.